KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

5

PA	:	H. ZULKIFLI,S.Pd,M.Pd
SATKER/SKPD	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
NAMA KPA	:	ELIDARTI,M.Pd
PROGRAM	:	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
NAMA KEGIATAN	:	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP
SUMBER DANA	:	APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan	:	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP
Organisasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	:	2019

1. Latar Belakang

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun,artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP. Minat peserta didik lulusan SD yang akan melanjutkan sekolah cukup tinggi sehingga tidak tertampung oleh sekolah yang ada atau jumlah lulusan SD yang tersebar sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan pemenuhan prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan salah satumya adalah *Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar* sehingga ruang belajar yang belum selesai menjadi lebih representatif. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan dengan lanjutan pembangunan ruang belajar sehingga Guru sebagai pendidik merasa nyaman dan bersemangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat terwujud.

3. Target/Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah *Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar* yang berada di SMPN 7 Linggo Sari Baganti.

4. Lokasi

Lokasi kegiatan pada SMPN 7 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar yang belum selesai 100%.

6. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu :

1.	Penanggung jawab Program	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2.	Penanggungjawab Kegiatan dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kepala Bidang Pembinaan SMP yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2019 tanggal ..... 2019.
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Staf/Pejabat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan No. 420/...../DPK-Sekretariat.01/..../2019 tanggal ..... 2019.

7. Teknis Pelaksanaan

Pihak Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan terakhir No. 16 tahun 2018 serta peraturan lain yang berlaku. Sistem pelaksanaan secara Pengadaan Langsung.

8. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses ***Pengadaan Langsung*** yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara umum waktu pelaksanaan mulai Februari 2019 s/d Desember 2019.

9. Biaya

Jumlah biaya kegiatan ini adalah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019.

10. Indikator Kinerja

1. Nama Kegiatan	:	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP
2. Pekerjaan	:	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar UPT SMPN 7 Linggo Sari Baganti.
3. Masukan/Input		
a. Jumlah Dana	:	Rp. 180.000.000,-
b. Jangka Waktu Pelaks	:	Februari s/d Desember 2019
4. Keluaran/Output		
a. Hasil/Result/Outcome	:	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan pada UPT SMPN 7 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Manfaat/Benefit	:	Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud.
c. Dampak	:	Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana pada jenjang Sekolah Menengah Pertama

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Painan, 29 November 2018

Disetujui Oleh :	Disiapkan Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ELIDARTI,M.Pd	**H. WIKANDRA, ST**
Kabid Pembinaan SMP	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP
Nip.19630201 198502 2 001	Nip.19741128 200701 1 004